

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagaimana landasan strategis negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana. *Penal policy* atau politik (kebijakan) hukum pidana itu, pada intinya bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberi pedoman kepada pembuat Undang-Undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).<sup>1</sup>

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah

---

<sup>1</sup> Teguh Prosestyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.1.

masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum atau peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>2</sup>

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staatrechtspolitik*.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan. Memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang

---

<sup>2</sup> <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/06/teori-kebijakan-hukumpidana-penal.html> diakses Rabu 3 Juni 2015.

dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larang tersebut.<sup>3</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepi sepi dari kejahatan.<sup>4</sup>

Kasus penculikan bayi di rumah sakit sudah menjadi fenomena di masyarakat. Banyak pemberitaan terkait kasus tersebut di media cetak maupun elektronik, dan bahkan dalam kehidupan kita sendiri dimana keluarga atau saudara kita mungkin pernah mengalami kasus tersebut.

Salah satu kasus penculikan bayi di rumah sakit Sumedang adalah kasus bayi bernama Noval Ramdhani, anak pasangan suami istri Priatna Kurnia usia (21) dan Nani Maryani usia (20) warga Dusun Babakanjati RT 4/RW 7, Desa Jatisari, Kecamatan Tanjungsari. Bayi mungil tersebut diduga diculik oleh seorang wanita yang mengaku bernama Khairunisa dan berpura-pura sebagai pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Pelaku mengenakan seragam pemda, berjilbab dan mukanya tertutup masker.<sup>5</sup>

Kasus lainnya adalah penculikan bayi laki-laki yang berusia dua hari di RSUD Ketileng, Semarang, Jawa Tengah. Bayi putra pertama pasangan Muhamad Yahron dan Ny Dwi Setyowati diculik pada saat bayi tersebut telah selesai dimandikan dan hendak dibawa ke ibunya. Sebelum

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 2008, hlm.1.

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Yogyakarta, 1994, hlm.11.

<sup>5</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2015/07/08/334056/polisi-masih-selidiki-kasus-penculikan-bayi-di-rsud-sumedang> diakses 8 July 2015 pukul 18:53 wib.

bayi diantarkan ke kamar ibunya oleh perawat rumah sakit datang seorang perempuan yang mengaku saudara Dwi Setyowati. Perawat yang percaya atas perkataan orang tersebut kemudian menyerahkan bayi tersebut itu kepadanya.<sup>6</sup>

Kasus yang sama juga terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Banjar, bayi bernama Alifa, buah hati pasangan Andang Rustandi dan Oom Komariah warga Cibentang, Kota Banjar, diculik selama tiga hari oleh seorang wanita berinisial DW yang menyamar sebagai perawat.<sup>7</sup>

Kasus penculikan yang melibatkan anak-anak bisa dijadikan sebagai suatu tindakan yang dapat menimbulkan masalah pada perkembangan emosi dan kejiwaan mereka. Sebab penculikan dapat menimbulkan trauma mendalam yang terbawa hingga si anak sampai pada masa selanjutnya, yaitu remaja atau dewasa.

Berbagai alasan penculikan terjadi, kesulitan ekonomi merupakan salah satu alasan terjadinya penculikan. Ada beberapa payung hukum yang melindungi anak dari penculikan, misalnya dapat kita lihat pada Pasal 330 ayat (1) dan (2) KUHP yang menyebutkan:

“Barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari orang yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”, Pada ayat berikutnya dijelaskan dijatuhkan hukuman selama-lamanya sembilan tahun jika perbuatan itu dilakukan dengan memakai tipu daya, kekerasan atau ancaman kekerasan atau kalau orang yang belum dewasa umurnya dibawah dua belas tahun.”

---

<sup>6</sup><http://news.okezone.com/read/2009/11/04/340/272359/direktur-rsud-ketileng-dilaporkan-korban-penculikan> diakses 4 november 2009 pukul 19:38 wib.

<sup>7</sup><http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2012/09/18/203947/kasus-pencurian-bayi-terungkap> diakses 18 september 2012 pukul 16:14 wib.

Namun, Pasal KUHP tersebut tidak digunakan lagi, karena ada asas dalam hukum yang bunyinya sebagai berikut ” *lex specialis derogat legi generalis*” artinya Undang-Undang atau peraturan yang khusus mengenyampingkan yang umum. Dengan demikian, Pasal yang mengatur tentang penculikan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut yang akan diberlakukan jika penculikan terjadi, dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia, penculikan anak termasuk dalam kategori perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Sebab, penculikan anak adalah perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja, direncanakan maupun tidak direncanakan secara melawan hukum yang membatasi hak asasi manusia seorang anak untuk hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin.

Setiap anak dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat kemanusiaanya, memperoleh perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat maupun negaranya. Selain itu anak berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing oleh orang tuanya atau walinya sampai dewasa.

Anak butuh kasih sayang dari orang tua atau keluarganya untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dalam mengejar masa depannya. Apapun alasan dari kejahatan penculikan anak, berarti

perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan pidana dan merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia pula.

Oleh karena itu, sebagai upaya menyelamatkan masa depan anak-anak, semua pihak harus bekerjasama untuk mencegah terjadinya penculikan. Anak-anak dimana pun mereka berada, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagai manusia kecil yang rentan. Untuk mewujudkan itu semua, kesadaran semua pihak untuk mencegah penculikan sangat diperlukan.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCULIKAN BAYI DI RUMAH SAKIT SUMEDANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam kasus penanggulangan penculikan bayi di Rumah Sakit Sumedang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penculikan bayi di Kabupaten Sumedang?
3. Upaya apa yang harus dilakukan Rumah Sakit Sumedang agar tidak lagi terjadi penculikan bayi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan dan penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui, mengkaji kebijakan hukum pidana dalam kasus penculikan bayi di Rumah Sakit Sumedang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji penanggulangan kejahatan penculikan bayi di Rumah Sakit Sumedang.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya Rumah Sakit agar tidak terjadi penculikan bayi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi banyak pihak, baik kegunaan secara teoritis secara praktis, antara lain:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademisi, baik dalam penelaahan hukum secara sektoral maupun menyeluruh dan sebagai tambahan kepustakaan untuk penelitian yang lebih komprehensif di masa yang akan datang.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta gambaran yang dapat di sumbangkan kepada pemerintah, non pemerintah, dan lembaga penegak hukum yang terkait dalam rangka penyelesaian perkara terjadinya kejahatan penculikan bayi di Rumah Sakit.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Pancasila sebagian dasar negara Indonesia merupakan landasan bagi bangsa Indonesia, dalam hal ini Pancasila dijadikan sebagai landasan sekaligus sebagai sumber hukum di Indonesia. Artinya segala peraturan di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang



kemudian aturan tersebut mengatur pola hidup masyarakat dengan pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan teori perjanjian masyarakat yang memberikan otoritas pada negara untuk memimpin dan mengatur rakyatnya. Teori perjanjian masyarakat kontrak sosial memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur sebagian hak yang telah diserahkan.<sup>8</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang menyebutkan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu didalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum, maka uraian dari hal tersebut terlihat dari batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 28B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

“(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

---

<sup>8</sup> I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.79.

- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan:

- “(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asai.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”

Sebagai uraian dari ketentuan-ketentuan tersebut khusus bagi anak di undangkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 83 dijelaskan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dengan demikian perbuatan tersebut di klasifikasi sebagai tindak pidana.

Prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak anak sebetulnya telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) meliputi:

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- 4) Penghargaan terhadap anak.<sup>9</sup>

Moeljatno menyatakan definisi hukum pidana, yang menurut beliau ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:<sup>10</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang dilarang serta sanksi yang dikenakan jika perbuatan-perbuatan tersebut tetap dilakukan oleh subjek hukum.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa keadaan subjek hukum yang telah melanggar larangan-larangan yang ada dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila ada subjek hukum yang disangka melakukan larangan tersebut.

Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan:

“Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karean di dalam dirinya melekat harkat martabat dan hak-hak sebagai manusia yaang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi perserikatan Bangsa-bangsa tentang hak-hak anak.”

---

<sup>9</sup> Melani dan Wagiaty Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm.130.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm.1.

Selanjutnya Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

“Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan bermartabat kemanusiaan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Dalam hukum pidana mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dikenal dengan adanya asas legalitas, asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.<sup>11</sup>

*lex specialis derogat legi generalis*” artinya Undang-Undang atau peraturan yang khusus mengecualikan yang umum. Dengan demikian, Pasal yang mengatur tentang penculikan yang ada dalam Undang-Undang

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *ibid*, hlm.6.

Perlindungan Anak tersebut yang akan diberlakukan jika penculikan terjadi.

Perbuatan penculikan bayi atau anak dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas, tindak pidana penculikan bayi atau anak di atur dalam Pasal:

Pasal 328 KUHPidana menyatakan:

“Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaanya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 330 KUHPidana menyatakan:

“(1) Barang siapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 331 KUHPidana menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya. Atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu masih berumur di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 334 KUHPidana menyatakan:

“(1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seseorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan.

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak Pasal 68 menyatakan:

“Mengatur mengenai perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan atau perdagangan sebagaimana di maksud dalam ayat (1)”.

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menyatakan:

“Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, di pidana dengan penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)”.

Pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menyatakan:

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak”.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### 1. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku<sup>12</sup> dalam hukum pidana yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menggunakan teori-teori hukum pidana yang relevan dengan objek penelitian. Metode ini akan memberikan yang sistematis, faktual, serta akurat tentang fakta-fakta serta sifat objek penelitian.

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menginventarisasi, mengkaji, dan meneliti data sekunder<sup>13</sup> berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum dan kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas berkaitan dengan penculikan bayi.

### 3. Tahapan Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian meliputi 2 tahap terdiri dari:

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm14.

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm.53.

a. Penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui:

1) Bahan hukum primer yaitu, dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang peruban atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
- d) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum perimer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum<sup>14</sup> yang memliki relavansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis.

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>14</sup> Soejono Sukanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm.,52.



sekunder.<sup>15</sup> Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media masa, internet, dan lain-lain.

#### b. Studi Lapangan

Tahapan ini akan dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti berupa wawancara, dokumen-dokumen resmi, laporan tahunan, atau laporan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini, serta melalui wawancara dan penyalinan data-data pihak yang berkompeten.

### 5. Alat Pengumpulan Data

#### a. Data Kepustakaan

Alat pengumpulan data hasil penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>15</sup> Soejono Sukanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, hlm. 52.

#### b. Data Lapangan

Alat pengumpuln data hasil penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan dan proposal, alat perekam, atau alat penyimpan.

#### 6. Analisis Data

Metode yang di gunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah normatif kualitatif. Normatif berarti penelitian didasarkan pada asas-asas hukum serta norma- norma hukum. Kualitatif berarti penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur-literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan obyek,kemudian dianalisis.

#### 7. Lokasi penelitian

- 1) Perpustakaan Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No.17, Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Mochatar Kusumaatmadja, jalan Depati Ukur No.35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Daerah (PUSDA) Kabupaten Sumedang, Jl. Mayor Abdurrahman No.185, Sumedang.
- 4) Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 07, Sumedang, Jawa Barat.